



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2005 - 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora secara resmi berdiri pada tahun 1749 dengan Bupati Pertama adalah Toemenggoeng Wilatikta yang menjabat pada tahun 1749 sampai dengan 1762. Sejak Bupati yang pertama sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Blora senantiasa melaksanakan proses pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang telah dilaksanakan menghasilkan banyak kemajuan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, namun masih menyisakan banyak persoalan dan tantangan yang membutuhkan penanganan melalui upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan diperlukan perencanaan yang sistematis, dengan tiga tahapan yaitu : rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membawa perubahan paradigma dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan yang demikian antara lain terjadi pada demografi, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya politik, pertahanan, dan

keamanan. Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (*road map*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora Tahun 2005–2025, adalah untuk :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Blora untuk jangka waktu 20 tahun ke depan (Tahun 2005–2025)

1.2.2. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora Tahun 2005–2025, adalah terumuskannya visi dan misi Kabupaten Blora yang mengacu kepada aspirasi masyarakat Kabupaten Blora serta memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mengacu kepada RPJP Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan idiil penyusunan RPJP Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 adalah Pancasila, sedangkan sebagai landasan konstitusional adalah Undang–Undang Dasar 1945. Adapun sebagai landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang–undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

1.4 HUBUNGAN RPJP KABUPATEN BLORA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Blora yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Blora untuk periode 20 tahun ke depan, yaitu ; meliputi kurun waktu mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang mengacu kepada RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional. RPJP Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Blora yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Blora yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2005–2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 - 2025

BAB V : PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 KONDISI SAAT INI

Pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Blora selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai sektor/bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik dan tata pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan perlu upaya-upaya lebih lanjut untuk mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten Blora 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus merupakan salah satu indikator pembangunan. IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang direpresentasikan melalui Usia Harapan Hidup, Perkembangan dan Kemajuan Sosial yang ditunjukkan dengan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran *riil* per kapita.

IPM Kabupaten Blora pada tahun 2004 sebesar 66,5 meningkat menjadi 67,9 pada tahun 2005 walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,8. Adapun komponen pembentuk IPM tersebut meliputi Usia Harapan Hidup meningkat dari 66,5 tahun (2004) menjadi 67,9 tahun (2005); Angka Melek Huruf meningkat dari 81,2 prosen (2004) menjadi 82,3 prosen (2005), Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 5,2 tahun (2004) menjadi 5,9 tahun (2005) dan Pengeluaran riil per Kapita sebesar Rp. 512.000,- (2004) meningkat menjadi Rp. 617.000,- (2005).

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Jumlah penduduk Kabupaten Blora tahun 2005 sebanyak 842.674 jiwa, terdiri dari 416.209 penduduk laki-laki dan 426.465 penduduk perempuan, sehingga sex ratio sebesar 97,60 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,46 % dan tingkat kepadatan penduduk 463 jiwa per Km² dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Cepu sebesar 1.593 jiwa per Km² dan terendah di kecamatan Jati sebesar 22 jiwa per Km².

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi yaitu 0,49 % tersebut, maka dalam rangka mengendalikan laju jumlah penduduk di Kabupaten Blora dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana. Fasilitas Keluarga Berencana yang ada berupa Klinik sebanyak 70 unit, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2004 sebanyak 78 unit, dengan didukung oleh tenaga medis 53 dokter dan bidan 180 orang meningkat dibandingkan tahun 2004 yang hanya sejumlah 159 bidan. Sampai dengan tahun 2005 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat 176.292 orang meningkat dari tahun 2004 sebanyak 174.211 orang.

Adapun akseptor yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang dengan metode kontrasepsi IUD sebanyak 15.129; MOP sebanyak 3.430 akseptor; MOW sebanyak 6.897 akseptor; Implant sebanyak 14.063 akseptor; Akseptor yang menggunakan non metode kontrasepsi jangka panjang dengan menggunakan suntik sebanyak 56.766 akseptor; Pil sebanyak 35.752 akseptor; kondom sebanyak 1.105 akseptor.

2. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Urusan ketenagakerjaan, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja terus diupayakan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 sebanyak 363.023 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 440.881 orang. Adapun untuk jumlah setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di

bawah 35 jam per minggu pada tahun 2003 sebanyak 26.065 dan terjadi peningkatan pada tahun 2005 menjadi 64.970 orang. Demikian juga jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun 2003 sebanyak 68.560 orang menjadi 92.689 orang pada tahun 2005.

Kondisi di atas terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pengangguran dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 18,46% dan pada tahun 2004 telah mengalami penurunan menjadi sebesar 14,74% pada tahun 2005. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik merupakan modal dan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan suatu wilayah. Sampai dengan tahun 2005 jumlah angkatan kerja (usia diatas 10 tahun) sebanyak 440.881 orang dimana yang telah bekerja sebanyak 375.911 orang dan yang masih mencari pekerjaan 64.970 orang. Adapun struktur Tenaga Kerja berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2005 meliputi pertanian sebesar 67,14%; pertambangan dan penggalian sebesar 0,26%; industri pengolahan sebesar 4,29%; listrik, gas dan air minum sebesar 0,78%; bangunan sebesar 6,52%; perdagangan dan rumah makan sebesar 7,67%; pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,16%; lembaga keuangan dan jasa perusahaan sebesar 3,39% dan jasa-jasa sebesar 7,79%.

Peningkatan jumlah tenaga kerja masih belum sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, dimana penawaran tenaga kerja pada tahun 2004 sebanyak 8.924 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 8.051 orang. Sementara itu jumlah permintaan tenaga kerja pada tahun 2004 sebanyak 897 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 350 orang.

Upaya perluasan lapangan kesempatan kerja juga dilakukan dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilakukan, antara lain melalui penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Adapun upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan magang.

Upaya perluasan kerja juga dilakukan melalui program transmigrasi. Jumlah transmigran dari Kabupaten Blora pada tahun 2004

sebanyak 15 kepala keluarga yang terdiri dari 55 jiwa, sedangkan yang telah mendaftarkan sebanyak 65 Kepala Keluarga yang terdiri dari 170 jiwa. Pelaksanaan transmigrasi tidak semata-mata ditekankan pada target pemindahan penduduk, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah penempatan.

3. Pendidikan.

Dalam kerangka pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan di Kabupaten Bora, yang dilaksanakan melalui pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Bora diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Bora yang berkualitas, cerdas, produktif dan berakhlak mulia melalui pengembangan dan peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Bora yang ada saat ini akan mempengaruhi beberapa indikator keberhasilan pendidikan antara lain, angka partisipasi kasar berupa angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Kasar pada tahun ajaran 2005/2006 sebesar 110,43% untuk SD/MI, 90,48% untuk SMP/MTs dan 57,12% untuk SMA/MA/SMK. Sedangkan Angka Partisipasi Murni sebesar 89,96% untuk SD/MI, 65,88% untuk SMP/MTs dan 38,92% untuk SMA/MA/SMK. Jumlah siswa SD/MI se-Kabupaten Bora pada tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 97.033 siswa, SMP/MTs sebanyak 38.519 siswa dan SMA/MA/SMK sebanyak 22.070 siswa.

Jumlah TK/RA tahun 2006 sebanyak 496 unit, yang sudah mempunyai gedung sendiri 368 dan yang belum mempunyai gedung sendiri 128 unit, sekolah SD/MI sampai tahun 2006 sebanyak 706 buah terdiri 4.122 ruang kelas, dengan kondisi ruang kelas yang baik hanya 1.650 ruang kelas, rusak ringan sebanyak 1.384 ruang kelas dan rusak berat sebanyak 1.088 ruang kelas. Jumlah SMP/MTs sebanyak 119 buah terdiri 1.121 ruang kelas, dengan kondisi ruang kelas yang baik sebanyak 965 ruang kelas, rusak ringan sebanyak 118 ruang kelas, dan kondisi

rusak berat sebanyak 38 ruang kelas. Sedangkan jumlah SMA/MA dan SMK sebanyak 55 buah terdiri 593 ruang kelas, dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 525 ruang kelas, rusak ringan sebanyak 53 ruang kelas serta kondisi rusak berat sebanyak 15 ruang kelas. Dengan demikian, bangunan sekolah untuk pendidikan dasar masih banyak yang memerlukan perbaikan sehingga layak dipergunakan untuk proses belajar mengajar.

Rasio guru dengan siswa sebesar 16 untuk SD/MI, 16 untuk SMP/MTs dan 13 untuk SMA/MA/SMK. Rasio guru dengan kelas sebesar 0,71% untuk SD/MI, 1,00% untuk SMP/MTs, 0,355 untuk SMA/MA/SMK. Sedangkan guru yang layak mengajar sebesar 77,99% untuk SD, 86,26% untuk SMP/MTs dan 90,73% untuk SMA/MA/SMK. Sedangkan guru yang semi atau tidak layak mengajar sebesar 22,01% untuk SD/MI, 13,73% untuk SMP/MTs dan 9,26% untuk SMA/MA/SMK. Dengan demikian, kualitas guru pada pendidikan dasar juga masih memerlukan peningkatan mengingat pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dari pendidikan selanjutnya.

Selama tahun ajaran 2005/2006 jumlah peserta ujian sebanyak 15.408 siswa untuk SD/MI dengan tingkat kelulusan sebesar 99,81%, untuk SMP/MTs dengan jumlah peserta ujian sebanyak 11.979 siswa tingkat kelulusan sebesar 82,50% serta SMA/MA/SMK dengan jumlah peserta ujian sebanyak 6.742 siswa tingkat kelulusan sebesar 48,94%. Pencapaian NEM sebesar 5,85 untuk SD/MI, 5,4 untuk SMP/MTs dan 6,05 untuk SMA/MA/SMK.

Angka putus sekolah sebesar 0,72% untuk SD/MI, 0,71% untuk SMP/MTs dan 0,62% untuk SMA/MA/SMK. Sedangkan angka mengulang sebesar 7,48% untuk SD/MI, 0,21% untuk SMP/MTs dan 0,45% untuk SMA/MA/SMK.

Fasilitas pendidikan perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, berpendidikan, berkecakupan dan memiliki daya saing.

4. Perpustakaan.

Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat juga dilakukan melalui penyediaan layanan kondisi perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

Pada tingkat SD/MI yang memiliki fasilitas perpustakaan sebesar 15,875 %, sedangkan untuk SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sebesar 71,42 %, untuk SMA/MA/SMK yang memiliki fasilitas perpustakaan sebesar 76,36 %

Perpustakaan Umum di Kabupaten Blora sebagai lembaga penyedia, pengolah dan pelayan informasi terus berbenah dan dikembangkan menjadi wadah potensi keilmuan baik bagi siswa maupun masyarakat. Untuk mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain aksesibilitas, kedekatan dengan potensi lain, daya tarik, keasrian, kenyamanan, keamanan, dan fasilitas lain sehingga gerakan gemar membaca dapat berkembang di Kabupaten Blora .

5. Pemuda dan Olah Raga.

Pada tahun 2005 jumlah pemuda di Kabupaten Blora sebesar 259.956 jiwa atau sekitar 30,79 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah sebesar ini merupakan aset sebagai kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan, sehingga membutuhkan keseriusan dalam pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Pembinaan kepemudaan dilakukan melalui berbagai pendekatan institusional seperti Pramuka, KNPI dan Karang Taruna serta organisasi kepemudaan lainnya. Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Blora pada tahun 2005 sebanyak 27 buah atau 12,22 %(persen) dari 221 buah organisasi yang masih perlu terus ditingkatkan samangat kepeloporannya dalam pembangunan di tengah terpaan globalisasi.

Kondisi keolahragaan baik olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat masih memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Blora belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan *even/kegiatan* kabupaten maupun provinsi.

6. Kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, artinya usia harapan hidup semakin panjang dan tidak sakit. Guna mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora, maka perlu ditetapkan Indikator yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan. Indikator kesehatan tersebut antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Balita Kurang Gizi, Penduduk Tanpa Akses terhadap Sarana Kesehatan, Angka Morbiditas dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Blora terus mengalami penurunan dari tahun 2003 sampai dengan 2005 dengan angka komposisi AKB tahun 2003 sebesar 72 kasus per-seribu kelahiran, sedangkan AKI mengalami peningkatan dari 10 kasus per seribu kelahiran pada tahun 2003 meningkat menjadi 16 kasus per-seribu kelahiran pada tahun 2004 dan menurun pada tahun 2005 menjadi 6 kasus per-seribu kelahiran. Hal ini membuktikan semakin baiknya pelayanan yang diberikan petugas kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan peningkatan akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Data Indikator kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Blora secara umum telah terjadi peningkatan cukup berarti, yaitu dari 64,4 tahun (2003), 66,5 tahun (2004), dan 67,9 tahun (2005) namun demikian Angka Harapan Hidup tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah (68,9 tahun).

Masalah Balita yang menderita kekurangan protein di Kabupaten Blora memerlukan perhatian serius, dimana Balita kurang gizi di Kabupaten Blora sebesar 12,7% pada tahun 2005 dan Balita dengan gizi buruk pada tahun 2005 sebesar 1,8% .

Pada tahun 2005 akses penduduk terhadap sarana kesehatan sebesar 49,5%, hal ini berarti masih ada 50,5% penduduk belum

mendapatkan akses terhadap sarana kesehatan. Sehingga diperlukan upaya peningkatan prasarana dan sarana kesehatan dalam prioritas pembangunan, karena dengan adanya peningkatan prasarana dan sarana kesehatan akan meningkatkan pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya akan menurunkan persentase penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan.

Indikator-Indikator lainnya adalah angka morbiditas dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Angka morbiditas di Kabupaten Bora meningkat dari 157.819 (2005) dan persentase persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan sebesar 75% (2005).

Prasarana fisik kesehatan tahun 2005 meliputi Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 2 buah dan rumah sakit swasta 2 buah, Puskesmas sebanyak 26 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 55 buah, Polindes sebanyak 29 buah, Poliklinik Kesehatan Desa sebanyak 69 buah dan Balai Pengobatan / Rumah Bersalin sebanyak 24 buah.

Prosentase Kepala Keluarga yang memanfaatkan air bersih di Kabupaten Bora sebesar 80%, pemanfaatan jamban sebesar 71% dan cakupan rumah sehat sebesar 67%. Kondisi perilaku masyarakat berdasarkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) baru mencapai 50%, sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2007 sebesar 65%. Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 67%.

Kondisi Tenaga Kesehatan / Medis masih banyak mengalami kekurangan. Sarana kesehatan masih banyak dibutuhkan diantaranya dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan sarjana kesehatan lainnya. Sarjana Muda Kesehatan juga mengalami kekurangan dan yang diutamakan Lulusan dari D3, yaitu D3 gizi, D3 AKL.

Jumlah penyakit menular yang ada di Kabupaten Bora mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2005 terutama untuk jenis kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi 153 kasus atau meningkat 850% dari tahun 2004 yang hanya berjumlah 18 kasus setelah mengalami penurunan dari 59 kasus pada tahun 2003. Kasus penyakit diare juga mengalami kenaikan yang cukup tajam dari 9.852

kasus pada tahun 2004 menjadi 12.039 kasus pada tahun 2005. Sedangkan untuk ISPA terus mengalami peningkatan dari tahun 2003 sebesar 394 kasus meningkat menjadi 511 kasus dan pada tahun 2005 menjadi 5.216 kasus.

Tingkat pelayanan kesehatan di BRSD Blora pada tahun 2005 *Bed of Rate* (BOR) sebesar 48,59%, TOR 5 hari, *length of Stay* (LOS) sebesar 3 hari, B TO 53 kali dengan rawat inap sebesar 5.077 pasien. Untuk BRSD Cepu BOR 44,84%, TOR 4 hari, LOS sebesar 3 hari dan BTO 51 kali dengan jumlah rawat inap sebanyak 5.099 pasien.

7. Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan fenomena permasalahan kesejahteraan sosial yang masih banyak ditemui. Walaupun upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin (seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar), tindak kekerasan, korban bencana alam dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.

8. Kemiskinan.

Secara umum kondisi penduduk miskin oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal : 1) memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, 2) melakukan kegiatan usaha produktif, 3) menjangkau akses sumber daya ekonomi, 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Pada tahun 2005 jumlah Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 239.460 KK atau 52,83 % menurun dibanding tahun 2004 sebanyak 235.705 KK atau 62,59 % dan pada tahun 2003 sebanyak 231.655 KK atau 63,02 %.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas utama pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, yang ditandai masih banyaknya jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Blora. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi mengingat kemiskinan adalah masalah yang multidimensional.

Upaya riil yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora adalah : 1) pengurangan beban biaya penduduk miskin dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi, 2) meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, sosial budaya dan politik. Bentuk *riil* tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu Pembangunan Prasarana Sosial Ekonomi Perdesaan (P2SE), Alokasi Dana Desa (ADD), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

9. Kebudayaan.

Aspek budaya merupakan modal dasar sekaligus kearifan lokal yang sangat penting dan potensial dalam rangka untuk mengembangkan diri tanpa harus tercabut dari akar budayanya. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing dan globalisasi yang kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya lokal.

Budaya yang masih menonjol eksistensinya di Kabupaten Blora meliputi kesenian musik tradisional yaitu karawitan, swarawati, terbang, kentrung, keroncong dan melayu maupun kesenian wayang yaitu wayang kulit, wayang orang, ketoprak, campursari, wayang krucil, wayang golek, barongan, serta seni tari yaitu reog dan tayub.

10. Agama.

Kehidupan beragama di Kabupaten Blora berlangsung dalam toleransi yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh rasa toleransi yang tinggi di antara pemeluk agama yang ada. Keharmonisan tersebut salah

satunya dapat dilihat dari banyaknya jumlah tempat peribadatan yang ada di sekitar warga masyarakat yang majemuk seperti masjid, gereja, vihara dan pura. Jumlah ibadah pada tahun 2005 mencapai 4.094 buah yang terdiri dari 811 Masjid, 2.960 Langgar, 230 Mushola, 54 Gereja Protestan, 14 Gereja Katholik dan 4 Vihara. Sedangkan jumlah pondok pesantren sebanyak 46 unit dengan santri sebanyak 5.937 orang, 3.121 khotib, 843 Alim Ulama dan 232 Mubaligh.

11. Perempuan dan Anak.

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Blora lebih banyak dibanding laki-laki walaupun demikian peran perempuan belum optimal, salah satunya karena masih adanya kesenjangan gender antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta dalam rangka perlindungan anak dan remaja, upaya yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Blora antara lain melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat alternatif serta langkah-langkah strategis yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.

Kondisi anak dan remaja di Kabupaten Blora masih perlu mendapat perhatian yang serius, dimana pada tahun 2005 masih terdapat 485 anak dan Balita terlantar, 6.443 anak terlantar, 25 anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 1.669 anak nakal, 778 anak jalanan dan 1.923 anak cacat. Sedangkan jumlah wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 8.138 jiwa dan 137 jiwa wanita yang menjadi korban tindak kekerasan.

2.1.2 Ekonomi.

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi.

Struktur perekonomian Kabupaten Blora masih didominasi oleh

sektor pertanian. Pembentukan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2005 atas dasar harga konstan tahun 2000, sektor ini menyumbang sebesar 52,06% terhadap PDRB. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor primadona berikutnya, dimana kontribusinya menempati urutan kedua dalam penyusunan PDRB di Kabupaten Blora, yaitu sebesar 14,72%.

Sektor pertambangan dan penggalan yang diharapkan dapat berperan besar bagi perekonomian daerah ternyata sumbangannya terhadap PDRB hanya sebesar 4,07%. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun 2001, dimana sektor pertanian menyumbang sebesar 54,50% terhadap PDRB. Sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya menempati urutan kedua dalam penyusunan PDRB di Kabupaten Blora, yaitu sebesar 13,74%. Sektor pertambangan dan penggalan sumbangannya terhadap PDRB juga masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 3,43%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2005 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan tahun 2000) tercatat sebesar 4,32%. Meskipun nilai ini tidak begitu besar, namun masih lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2001 sebesar 2,06%, tahun 2002 sebesar 2,275, tahun 2003 sebesar 3,48% dan tahun 2004 sebesar 3,825. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi menuju yang lebih baik setelah terjadinya krisis ekonomi dengan kecenderungan pertumbuhan yang positif dan semakin meningkat nilainya.

Demikian pula untuk pertumbuhan *riil* sektoral secara umum juga mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Namun demikian tingkat pertumbuhan *riil* sektoral masih relatif belum merata untuk seluruh sektor. Pada tahun 2005 pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh sektor pertambangan dan penggalan sebesar 12,75% yang berasal dari sub sektor pertambangan migas yang tumbuh sebesar 13,15%, sedangkan pertumbuhan terendah adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang tingkat pertumbuhannya sebesar 1,94%. Hal ini agak sedikit berbeda dengan kondisi tahun 2001, dimana pertumbuhan paling tinggi

dicapai oleh sektor listrik, gas dan air bersih yang tumbuh sebesar 5,26%, sedangkan pertumbuhan terendah adalah sektor angkutan dan komunikasi yang tingkat pertumbuhannya juga minus, yaitu sebesar 0,73%.

Apabila dilihat pada variabel – variabel ekonomi makro daerah, Kabupaten Blora menunjukkan kecenderungan yang positif. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya tingkat pendapatan per-kapita sebagai salah satu indikator langsung tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2005 PDRB perkapita sebesar Rp. 3.040.458,- naik dari tahun sebelumnya (2004) sebesar Rp. 2.691.704,-

Sedangkan atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 pendapatan per-kapita tahun 2005 sebesar Rp. 2.060.156,00 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2001 sebesar Rp.1.826.008; tahun 2002 sebesar Rp.1.858.116; tahun 2003 sebesar Rp.1.914.494 dan tahun 2004 sebesar Rp.1.982.045).

Laju inflasi di Kabupaten Blora sebagai parameter untuk mengukur tingkat fluktuasi harga nilainya relatif kecil, yaitu masih dibawah dua *digit* / dibawah 10%. Tahun 2005 tingkat inflasi umum di Kabupaten Blora hanya 8,65%, lebih tinggi daripada laju inflasi tahun sebelumnya (tahun 2004) yang sebesar 8,39%.

2. Industri.

Perkembangan perindustrian menunjukkan adanya peningkatan baik pada industri kecil, industri sedang dan industri besar, maupun industri rumah tangga mengalami penurunan. Industri rumah tangga meningkat sebesar 2 % menjadi 10.911 buah pada tahun 2005 dengan jumlah pekerja sebanyak 27.097 orang serta nilai produksi sebesar Rp. 368.510.025.000,-. Industri kecil meningkat sebesar 3 % menjadi 1.137 buah pada tahun 2005 dengan jumlah pekerja sebanyak 6.613 orang serta nilai produksi mencapai Rp. 58.973.100.000,-. Industri besar meningkat 5 % menjadi 7 buah pada tahun 2005 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.766 orang meningkat dibanding tahun 2004 yang hanya sebanyak 1.254 orang dengan nilai produksi sebesar Rp. 74.918.164.000,-. Selama tahun 2005 dilakukan pembinaan

kepada industri rumah tangga sebanyak 50 kali dan industri kecil sebanyak 575 kali dengan anggaran sebesar Rp. 1.271.685.000,- untuk industri rumah tangga dan Rp. 1.271.685.000,- untuk industri kecil.

3. Koperasi dan UKM.

Pemberdayaan UKM dan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat atau dengan kata lain Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis moneter diikuti banyak usaha konglomerasi yang bertumbangan dan dililit hutang, sementara usaha kecil menengah terutama yang berorientasi ekspor justru mampu meraih keuntungan yang luar biasa dan sebagian lagi berhasil *survive* dengan berbagai cara karena kecilnya investasi dan modal yang berputar.

Perkembangan peran UKM meningkat dari 1.828 buah pada tahun 2004 menjadi 1.842 UKM pada tahun 2005 dengan jumlah *asset* Rp.34.050.000.000,- meningkat dibanding tahun 2004 sebesar Rp.29.950.000.000,- dengan pertumbuhan sebesar 88% menjadi Rp.182.400.000.000,-. Perkembangan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 17 unit yang mengalami stagnasi, namun mengalami peningkatan *asset* sebesar 3% menjadi Rp. 15.850.000.000,- dan jumlah omset mengalami peningkatan sebesar 2,5 % menjadi Rp.2.600.000.000,-. Jumlah UKM non KUD mengalami peningkatan sebesar 10 % menjadi 49 unit dengan peningkatan jumlah pekerja sebesar 2 % sehingga menjadi 63.636 orang, peningkatan jumlah *asset* sebesar 15 % menjadi Rp.99.429.000.000,- dan jumlah omset meningkat 15 % dengan nilai Rp.133.603.000.000,-

4. Investasi.

Urusan investasi merupakan urusan yang sangat penting untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur investasi. Selain itu tentunya harus pula didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk memancing minat investor untuk berinvestasi.

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang meliputi penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Kebijakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha antara lain kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur dan kebijakan tata ruang yang konsisten.

5. Pertanian.

Secara umum ekonomi Kabupaten Blora masih didominasi oleh sektor pertanian dimana pertanian masih merupakan lapangan usaha (sektor) yang memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang paling besar yaitu sebesar 54,40 % pada tahun 2005 dan paling banyak menyerap tenaga kerja.

Kabupaten Blora dengan luas 182.058.797 hektar atau 5,59 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari lahan sawah sebesar 46.129.921 hektar (25,33 %) dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,67 %. Pada tahun 2005 luas penggunaan lahan di Kabupaten Blora adalah hutan sebesar 49,51 %, lahan sawah sebesar 25,33 %, pekarangan sebesar 9,22 %, tegalan sebesar 14,43 % dan lain-lain sebesar 1,34 %.

Jenis komoditas tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Blora yang menonjol pada tahun 2005 adalah padi dengan produksi sebesar 291.744 ton , jagung dengan produksi sebesar 273.297 ton, dan tebu dengan produksi sebesar 1.106 ton.

Perkembangan hortikultura di Kabupaten Blora masih didominasi oleh komoditas mangga, walaupun pada tahun 2004 jumlah produksinya menurun dari 415.156 kwintal menjadi 362.246 kwintal pada tahun 2005.

Populasi ternak potensial di Kabupaten Blora tahun 2005 terdiri dari sapi potong dengan populasi sebanyak 217.497 ekor, kambing sebanyak 97.904 ekor, dan ayam kampung sebanyak 1.991.960 ekor.

Kondisi lahan kritis di Kabupaten Blora masih cukup mengkhawatirkan, namun demikian perkembangan dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin menurunnya luasan lahan kritis yang semula pada tahun 2004 sebesar 1.648,45 ha menjadi 1.448,45 ha pada tahun 2005, demikian halnya dengan luasan lahan agak kritis mengalami penurunan. Sedangkan luasan yang relatif tetap dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2005 adalah berupa tegalan, kondisi ini disebabkan penanganan utama lebih dititikberatkan pada lahan sangat kritis dan agak kritis. Jumlah total lahan yang direhabilitasi juga terus mengalami peningkatan dari 5.471,36 Ha pada tahun 2004 menjadi 12.086,35 pada tahun 2005.

6. Kelautan dan Perikanan.

Perkembangan hasil produksi perikanan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meskipun di Kabupaten Blora kesulitan dalam memperoleh sumber-sumber air, namun setiap ada lokasi yang memungkinkan untuk pengembangan budi daya ikan diberikan bibit ikan, terutama di embung-embung yang sudah banyak dibuat. Perkembangan produksi perikanan yang terbesar terjadi pada perikanan dibudidaya sungai dengan hasil produksi sebesar 250.400kg pada tahun 2005 sehingga mengalami penurunan dibanding tahun 2004 sebesar 7,4 %(persen).

7. Pertambangan.

Kebutuhan energi listrik sepenuhnya dapat dinikmati seluruh masyarakat di Kabupaten Blora, khususnya di beberapa pedukuhan. Disamping kebutuhan energi listrik, penambangan bahan galian C dan ABT serta distribusi hilir migas masih memerlukan pembinaan, pengawasan dan penertiban perijinan dari Pemerintah Kabupaten Blora.

Penerangan jalan juga masih banyak mengalami kekurangan di perkotaan maupun di perdesaan. Upaya pemerataan penerangan terus dilakukan dengan mengidentifikasi lampu penerangan yang legal. Upaya ini sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan penerangan jalan umum, baik dari sisi pembiayaan (pembayaran rekening listrik) dan pemeliharaan, dengan identifikasi ini dapat diperoleh rencana

pendapatan dari pajak penerangan jalan umum dan pengeluaran untuk operasionalnya.

Bagi desa/kelurahan atau kawasan yang masih memerlukan penambahan penerangan jalan terus dilakukan dan antisipasi dengan menetapkan skala prioritas.

8. Perdagangan.

Komoditas perdagangan yang menjadi unggulan dari tahun ke tahun masih relatif tetap, yaitu kayu olahan, mebel, cinderamata, gembol jati dan sarang burung, hal ini ditunjukkan oleh nilai produksi komoditas perdagangan mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pertumbuhan komoditas cinderamata sebesar minus 50,35 % sedangkan pertumbuhan tertinggi pada komoditas mebel sebesar 30,57 %, sarang burung sebesar 1,90 % dan kayu olahan sebesar 5 %.

Pada skala usaha perdagangan, untuk perdagangan besar meningkat sebesar 24,13 % dari 58 unit pada tahun 2004 menjadi 72 unit pada tahun 2005 dan perdagangan menengah mengalami peningkatan sebesar 9,92 % dari 423 unit pada tahun 2004 menjadi 465 unit pada tahun 2005.

9. Pariwisata.

Obyek pariwisata di Kabupaten Blora sebanyak 30 buah yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : wisata alam sebanyak 14 unit, wisata buatan sebanyak 6 unit dan wisata ziarah sebanyak 10 unit. Oleh karena itu pengembangan urusan pariwisata dilakukan dengan pariwisata berbasis masyarakat dimana dalam keterlibatan ini diharapkan dapat membawa kondisi yang sejuk untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Blora. Selain itu juga perlu melibatkan dan menggandeng dunia usaha dalam rangka menjual image wisata dan sekaligus pelaku usaha, sehingga sinergitas ini akan menjadikan pariwisata menjadi berkembang.

Sedangkan akomodasi penunjang pariwisata yaitu hotel bintang satu sebanyak 2 buah dan hotel non bintang sebanyak 25 buah. Untuk rata-rata lamanya tamu tinggal di hotel adalah 2 (dua) hari. Adapun untuk banyaknya usaha pada bidang pariwisata, banyaknya agen wisata sebanyak 2 buah dan travel sebanyak 6 buah. Untuk jumlah

kunjungan wisata, kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2009 sebanyak 85.436 orang dan wisata asing sebanyak 356 orang dan sebagian besar dari Eropa dengan tujuan wisata adalah Loko Tour.

Sedangkan wisata kebudayaan di Kabupaten Blora diantaranya dapat dilihat dari kondisi kelompok kesenian dan padepokan kesenian yang ada. Di Kabupaten Blora kelompok kesenian yang paling banyak peminatnya adalah Kelompok Barongan yang berjumlah 396 kelompok. Kemudian kesenian Qasidah/Hadrah yang jumlahnya mencapai 234 kelompok, dimana hal ini menunjukkan ciri budaya religius yang cukup menonjol di Kabupaten Blora. Sedangkan untuk Padepokan/Grup Tari, yang paling banyak adalah Tarian Rakyat Tayuban, yakni sebanyak 77 kelompok. Adapun kelompok wayang kulit purwo sejumlah 34 kelompok dan kesenian ketoprak berjumlah 29 kelompok.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini didukung dengan ketersediaan sarana telekomunikasi dan informatika yang mudah diakses oleh masyarakat. Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi kebutuhan dalam rangka penyediaan *e-government* bagi birokrasi pemerintahan.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian telah dilaksanakan, namun demikian belum secara optimal diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif kurang memiliki nilai implementatif atau sulit menjadi dasar operasional dan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.

Hasil temuan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat sangat bermanfaat dalam membantu kehidupan perekonomian terutama bagi masyarakat perdesaan yang bergerak di bidang industri dimana

bahan bakunya menggunakan bahan lokal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Sarana dan Prasarana.

Infrastruktur merupakan pendukung utama pergerakan perekonomian di Kabupaten Blora, yang masih memerlukan perhatian yang cukup besar dalam mengupayakan agar infrastruktur khususnya jalan, jembatan, saluran irigasi, fasilitas permukiman dan prasarana perkotaan menjadi lebih baik dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Blora.

Jalan sebagai salah satu sarana penting dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa sehingga kualitas jalan perlu ditingkatkan dan dijaga agar tetap berfungsi dengan baik. Ruas jalan yang ada di Kabupaten Blora sampai saat ini adalah sepanjang 658,23 kilometer yang terdiri atas 153,58 km jalan provinsi dan 504,65 km jalan kabupaten, dengan rincian jenis permukaan diaspal sepanjang 326 km, *hotmix* sepanjang 167 km dan permukaan batu sepanjang 39 km.

Saat ini kondisi jalan yang baik hanya sepanjang 86,01 km atau sebesar 17,04 % dan kondisi rusak sepanjang 116,79 km atau sebesar 23,14 %. Jalan-jalan poros desa juga perlu mendapat perhatian untuk memperlancar jalur ekonomi dan membuka wilayah-wilayah terisolir.

1. Perhubungan.

Mobilitas barang dan jasa sangat dipengaruhi adanya moda perhubungan antar wilayah. Perkembangan sarana transportasi di Kabupaten Blora selama pada tahun 2005 jumlah sepeda motor sebesar 138.040 buah mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 yaitu sebanyak 94.752 buah, jumlah mobil bus tahun 2004 sebanyak 525 buah menurun pada tahun 2005 sebanyak 514 buah, jumlah mobil barang pada tahun 2004 sebanyak 4.059 buah meningkat pada tahun 2005 sebesar 4.625 buah, dan jumlah mobil penumpang pada tahun 2004 sebanyak 3.440 buah meningkat menjadi 4.371 buah pada tahun 2005.

Dengan perkembangan sarana transportasi baik kendaraan pribadi maupun umum maka Urusan Perhubungan memerlukan kesiapan

untuk mengatur dan mengeluarkan regulasi sehingga pelayanan transportasi bisa meningkat.

2. Perumahan dan Permukiman.

Kondisi perumahan perlu mendapat perhatian, mengingat masih banyaknya rumah yang belum berfungsi secara optimal dan memenuhi standar perumahan sehat. Pada tahun 2009 telah diupayakan penataan rumah kurang layak huni di beberapa desa / kelurahan dengan sasaran utamanya adalah mengupayakan rumah yang layak huni dan terus dilanjutkan pada tahun 2010 terutama untuk rumah masyarakat miskin.

Untuk mencukupi kebutuhan rumah masyarakat Blora, melalui pihak swasta telah dikembangkan wawasan perumahan di Tawangrejo Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Cepu dan sampai saat ini masih dalam tahap pengolahan tanah dan pembangunan rumah. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, perlu diupayakan pemberdayaan komunitas perumahan sehingga pengelolaan limbah rumah tangga dan persampahan dapat tertangani dengan baik. Rumah-rumah warga Blora yang terkena bencana alam (longsor, angin ribut dan banjir) juga perlu dilakukan pembangunan kembali sehingga tercipta kondisi rumah tangga yang sejahtera, di samping itu pula perlu dibangun rumah panggung untuk tempat evakuasi daerah rawan bencana dan banjir.

Kebersihan dan keindahan kota merupakan kebutuhan bersama yang mendapatkan perhatian khusus. Dari kondisi fisik kota ini, wajah kota dengan seluruh pengelolaan kota akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kota yang tertib menunjukkan pengelolaan kota dengan segala kebijakan yang sangat baik dan didukung oleh masyarakatnya. Sampai saat ini, tingkat pelayanan persampahan di perkotaan masih belum optimal sehingga masih banyak daerah dan kawasan yang belum terjangkau. Namun demikian, mengingat bahwa kebersihan menjadi kebutuhan bersama, maka perlu adanya upaya-upaya pengelolaan persampahan yang diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana persampahan di

Kabupaten Blora masih belum mencukupi untuk pengelolaan persampahan.

Pengelolaan limbah padat, juga menjadi perhatian utama dengan perbaikan dan pemeliharaan TPA. Dengan demikian kawasan sekitar TPA tidak merusak lingkungan dan tidak terjadi polusi udara, polusi tanah dan kesehatan lingkungan tetap akan terjaga.

Disamping itu pengelolaan makam juga ditingkatkan dengan mengupayakan perbaikan kawasan sekitar makam sehingga tidak terkesan angker dan kumuh.

Di beberapa desa juga diupayakan peningkatan pelayanan air minum karena masih banyak desa-desa yang belum tercukupi kebutuhan air minum baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

3. Sumber Daya Air.

Kabupaten Blora dikenal sebagai wilayah yang memiliki masalah dalam ketersediaan air, terutama pada saat musim kemarau. Permasalahan dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Blora antara lain: a) belum meratanya pelayanan air bersih oleh PDAM, sebagai faktor utama penyebabnya adalah belum tercukupinya kapasitas pengelolaan pada Instalasi Pengolah Air Minum (IPA) yang dimiliki dan b) debit air baku baik air permukaan maupun air tanah yang tidak mencukupi, hal ini dapat dilihat dari pelanggan PDAM yang hanya berada di 8 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Blora.

Sumber daya air yang ada di Kabupaten Blora, secara umum terdiri atas mata air, waduk dan bendung. Dari data yang ada jumlah sumber daya air terbanyak adalah bendung sebanyak kurang lebih 50 buah, selanjutnya mata air kurang lebih 37 buah dan paling sedikit adalah Waduk/Embung kurang lebih ada 6 buah. Dari data yang diperoleh, saat ini banyak waduk dan embung yang kurang berfungsi secara optimal, pompa irigasi dan bangunan irigasi lainnya banyak yang rusak dan hilang, demikian juga jaringan irigasi kurang berfungsi dengan baik, oleh karena itu perlu adanya penanganan yang serius.

4. Telekomunikasi.

Perkembangan bidang pos dan telekomunikasi saat ini cukup pesat utamanya jasa pos pengiriman paket, surat dan barang cetakan. Pada tahun 2005 jumlah surat dalam negeri sebanyak 95.561 surat yang terdiri dari surat biasa sebanyak 91.835 buah dan surat dinas sebanyak 3.726 buah, surat kilat sebanyak 72.922 buah, kilat khusus sebanyak 56.092 buah dan express sebanyak 2.023 buah. Adapun surat luar negeri sebanyak 1.706 buah yang terdiri dari surat biasa sebanyak 1.627 buah dan surat dinas sebanyak 79 buah.

Keinginan masyarakat dan dunia usaha akan sambungan telepon meningkat, sedangkan jumlah Satuan Sambungan Telepon (SST) terpasang masih jauh dari keutuhan. Tetapi dengan adanya teknologi di bidang telekomunikasi, sebagian kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh sambungan telepon seluler baik berupa GSM maupun CDMA terutama di daerah perkotaan.

Pada tahun 2005 tercatat jumlah pelanggan telepon sebanyak 10.127 yang terdiri dari 283 pelanggan pemerintah, 205 pelanggan Perusahaan Negara dan 9.637 pelanggan swasta. Sedangkan jumlah Wartel sebanyak 187 buah dengan Kamar Bicara sebanyak 261 buah.

5. Energi.

Pada bidang ketenagalistrikan di Kabupaten Blora terbagi menjadi 2 (dua) ranting yaitu ranting Cepu yang meliputi kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken dan ranting Blora yang meliputi kecamatan Bogorejo, Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Jajah, Ngawen, Kunduran dan Todanan.

Pada tahun 2005 tercatat kapasitas daya yang tersambung sebesar 90.000,200 VA (*Volt Ampere*) meningkat dibandingkan tahun 2004 sebesar 86.749,030 dengan jumlah pelanggan 141.180 pelanggan pada tahun 2005 meningkat dibandingkan tahun 2004 sebanyak 126.323 pelanggan.

2.1.5 Politik dan Tata Pemerintah.

Perkembangan politik di daerah cukup menonjol sejalan dengan pesatnya pertumbuhan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan

termasuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembelajaran politik masyarakat di Kabupaten Blora.

Untuk mewujudkan kehidupan sosial politik yang kondusif dan masyarakat yang tentram, aman dan tertib perlu diupayakan adanya transparansi, dan kebebasan menyampaikan aspirasi, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dalam rangka pesta demokrasi tinggi.

Keberhasilan penting dalam bidang politik di Kabupaten Blora adalah kemampuan serta meningkatnya partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum yang meliputi Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan modal dasar yang strategis dalam sistem demokrasi guna kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal/kabupaten.

Partisipasi politik warga Kabupaten Blora yang tinggi ditunjukkan dengan penggunaan hak pilih dalam Pemilu Legislatif 2004 sebesar 84%, pada Pemilu Presiden Putaran I sebesar 81 persen serta Pemilu Presiden Putaran II sebesar 79%. Sedangkan partisipasi politik dalam Pilkada Langsung pada tanggal 26 Juni 2005 adalah sebesar 70%.

Perkembangan demokrasi dan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Blora cukup baik dan prospektif terlihat dengan munculnya kesadaran masyarakat tentang arti penting hak – hak politik rakyat dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Berbagai program kegiatan seperti pendidikan politik dan komunikasi diantara pelaku politik telah dilaksanakan dengan baik, misalnya melalui forum komunikasi dan koordinasi antar tokoh politik dengan tokoh masyarakat, pemuda, kegiatan-kegiatan lintas partai politik serta lintas organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam jangka panjang hal ini diharapkan akan mampu menjadi salah satu modal utama dalam penyelenggaraan proses politik yang lebih demokratis.

Beberapa Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Blora telah menjalankan fungsinya dengan baik melalui berbagai aktivitas politik yang meliputi seleksi kepemimpinan dan rekrutmen politik bagi anggota-

anggota mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan. Partai politik juga melaksanakan berbagai kegiatan politik yang bermuara pada upaya pembelajaran politik lokal sebagaimana pada Pilkada langsung dimana sejak pencalonan kepala daerah sampai dengan pemungutan suara dapat berlangsung aman dan lancar.

2.1.6 Keamanan dan Ketertiban.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan.

Walaupun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bora. Hal ini ditunjukkan dengan data tahun 2005 terdapat 205 tindak kejahatan yang meningkat dibanding tahun 2004 sebanyak 178 tindak kejahatan.

2.1.7 Hukum dan Aparatur.

1. Hukum.

Tindak pidana hukum yang masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Bora pada tahun 2005 tercatat sebanyak 9.327 tindak pidana yang sedang diproses, yang terdiri dari pidana penjara sebanyak 239 kasus dan pidana denda sebanyak 9.088 kasus. Sedangkan banyaknya perkara yang telah diselesaikan sebanyak 9.287 perkara.

2. Aparatur.

Sehubungan dengan tuntutan perubahan regulasi dan perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bora melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan terhadap urusan atau fungsi yang menjadi kewenangannya. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan melakukan penataan terhadap organisasi

perangkat daerah yang disesuaikan dengan urusan dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Blora telah berusaha menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme aparatur pemerintah serta pengembangan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Blora didukung oleh 28.279 Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi pendidikan meliputi : SD sebanyak 709 orang (2,51 %), SMP sebanyak 435 orang (1,54 %), SMA sebanyak 3.648 orang (12,90 %), Diploma sebanyak 2.717 orang (9,61 %), Sarjana sebanyak 2.396 orang (8,47 %) dan Paskasarjana sebanyak 76 orang (0,27 %). Sedangkan dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah telah diselenggarakan berbagai pendidikan dan latihan baik teknis maupun fungsional serta diklat struktural.

2.1.8 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan.

1. Wilayah.

Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Blora terletak di antara 111° 16' sampai dengan 111° 33'8 bujur timur dan diantara 6° 52'8' sampai dengan 7° 24'8' Lintang Selatan, berada pada ketinggian 25 meter hingga 500 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi letak tersebut, maka jarak terjauh dari wilayah barat ke wilayah timur sepanjang 87 km dan dari wilayah utara ke wilayah selatan sejauh 58 km.

Sedangkan secara administrasi, Kabupaten Blora terbagi atas 16 (enam belas) kecamatan dan 271 desa serta 24 kelurahan. Wilayah Kabupaten Blora, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan,

di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Luas Kabupaten Blora adalah 182.058,797 ha atau 5,59 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi topografi datar sampai bergelombang. Pada bagian utara membujur pegunungan Kendeng Utara dari arah barat ke timur, sedangkan di sebelah selatan membujur pegunungan Kendeng Selatan yang membujur dari barat ke timur.

Berdasarkan peruntukannya, wilayah Kabupaten Blora terdiri atas lahan sawah seluas 25,35 persen (46.143,958 ha), lahan untuk bangunan/ pekarangan 9,24 persen (16.770.172 ha), tanah tegalan 14,44 persen (26.285.926 ha), hutan 49,67 persen (90.416.52 ha) dan 1,31 persen (2.381.259 ha) untuk peruntukan lainnya.

Luas lahan persawahan 46.143,958 ha tersebut meliputi ; 7.449 ha (16,14 persen) beririgasi teknis, 2,10 persen (967 ha) beririgasi setengah teknis, 8,92 persen (4.114 ha) berpengairan sederhana/PU, 3,55 persen (1,640 ha) berpengairan irigasi desa/non PU 64,40 persen (29.717.958 ha) tadah hujan dan 4,89 persen (2.256 ha) berpengairan dari program P2AT. Penggunaan tanah untuk sawah terkonsentrasi di Kecamatan Kunduran dan Kedungtuban sebagai lumbung padi Kabupaten Blora.

Dari 90.416,52 ha wilayah hutan, 98,89 persen atau 89.411,52 ha adalah hutan negara dan luas hutan rakyat adalah 1.005 ha atau 1.11 persen. Sedangkan untuk lahan kritis, 26.308, 35 ha berupa tegalan, 1.648,44 ha tergolong kritis, 5.11.49 ha sebagai lahan agak kritis, 12.808.06 ha sebagai lahan yang potensial kritis dan 5.471,37 ha sebagai lahan yang telah direhabilitasi.

2. Tata Ruang.

Urusan penataan ruang memiliki 3 (tiga) pendekatan program yang penting yaitu, penyusunan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Dari sisi perencanaan, kecamatan yang memiliki dokumen

rencana tata ruang baru sebanyak 6 (enam) Kecamatan yang rata-rata sudah harus dilakukan penyesuaian dan bahkan penyusunan kembali. Pemerintah Kabupaten Bora melalui anggaran dari APBD Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bora yang menjadi induk penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Bora. Sedangkan dari APBD Propinsi Jawa Tengah juga diperoleh anggaran untuk menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Padangan - Cepu sepanjang jalan Padangan sampai terminal Cepu. Dari anggaran APBN juga diperoleh alokasi dana untuk menyusun rencana detail kota Cepu dalam mendukung industri migas.

Mengingat kurangnya sosialisasi rencana tata ruang yang telah disusun, masyarakat masih belum banyak yang memahami sehingga kurang diperhatikan pemanfaatannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ketidak-sesuaian rencana tata ruang telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bora yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Kelompok Kerja.

3. Pertanian.

Dalam bidang pertanian yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan ditata karena mempunyai fungsi nilai strategis dalam tatanan kehidupan manusia bersosial dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan fungsi pemanfaatannya, baik fungsi lindung maupun budi daya sesuai RTRW.

Dalam kerangka inventarisasi dan penataan seluruh asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bora, diperlukan suatu manajemen informasi pertanian yang dapat diandalkan. Dengan adanya manajemen informasi pertanian tersebut diharapkan mampu menjadikan data dan informasi tentang asset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bora.

2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bora meliputi sumber daya lahan, sumber daya mineral, bahan tambang minyak, sumber daya air dan sumber daya hutan. Sumber daya mineral

bahan galian golongan C, meliputi ; batu gamping, tanah liat dan pasir kwarsa, adapun sumber daya air meliputi waduk Tempuran, Greneng, Kulur dan Bruk.

Kabupaten Blora mempunyai potensi sumber bahan tambang minyak dan gas bumi berlokasi di beberapa wilayah kecamatan, diantaranya Kecamatan Cepu dan Kradenan. Potensi tersebut berdasarkan bagi hasil dengan pemerintah pusat dan provinsi akan mampu memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Blora.

Kondisi lahan kritis di Kabupaten Blora masih cukup memprihatinkan, namun demikian luasan lahan kritis dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan luasan lahan kritis yang semula 3.123,44 ribu hektar pada tahun 2003 menjadi 1.648,45 ribu hektar pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 sebesar 1.448.450 ribu hektar. Demikian halnya dengan lahan agak kritis yang semula 5.616,49 ribu hektar pada tahun 2003 menjadi 5.111,50 ribu hektar pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 seluas 3.089,20 ribu hektar.

Luasan kawasan hutan di Kabupaten Blora sebesar 90.416,520 ha atau sebesar 49,8% dari luasan Kabupaten Blora, dari luasan hutan tersebut 20% mengalami kerusakan akibat penjarahan hutan yang disebabkan oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik sehingga tekanan terhadap sumber daya hutan meningkat.

2.2 TANTANGAN

Banyak kemajuan yang telah dicapai namun disisi lain masih banyak tantangan yang perlu dicarikan solusinya, baik itu di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

Penduduk atau sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Blora antara lain jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar apabila tidak segera diatasi bisa mengganggu suasana aman, tenang dan damai karena bisa memunculkan banyak penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat.

Jumlah penduduk buta huruf dan berpendidikan rendah yang cukup besar juga belum mampu mendukung serta memperlemah modal dasar pelaksanaan pembangunan secara optimal. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain mencakup aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidikan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan yang semakin baik.

Di bidang kesehatan dengan merebaknya beberapa penyakit utamanya demam berdarah, HIV/AIDS, kasus kurang gizi yang masih sering terjadi memerlukan perhatian yang lebih serius, utamanya peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis, demikian juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah kesehatan bagi kemajuan suatu daerah.

Di bidang kebudayaan tantangan kedepan yang perlu diwaspadai antara lain pengaruh dan dampak negatif globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi yang semakin mudah dan tanpa batas semakin mempertipis nilai-nilai moral, budaya dan agama serta nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat selama ini. Selain itu perilaku masyarakat yang semakin konsumtif, individualistis dan egoistis sehingga tidak lagi peduli dengan sesama anggota masyarakat, menipisnya budaya gotong royong akan mengarah pada terjadinya disintegrasi sosial di tengah masyarakat yang dampaknya akan menghambat proses pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan.

2.2.2 Ekonomi.

Kondisi eksisting pembangunan perekonomian Kabupaten Blora, beberapa indikator ekonomi sudah menunjukkan kondisi yang relatif baik, namun belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditambah dengan minimnya lapangan pekerjaan menambah permasalahan yang ada. Oleh karena itu tantangan ekonomi kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan pemerataan pendapatan perkapita yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Globalisasi ekonomi dunia serta diberlakukannya perdagangan bebas mengakibatkan intensifnya penetrasi pasar, menuntut para pelaku ekonomi untuk meningkatkan kualitas barang jasa agar lebih kompetitif dan bisa bersaing di pasar regional maupun internasional. Tantangan kedepan perlu memanfaatkan potensi, keunggulan dan kekhasan masing-masing dalam upaya meningkatkan daya saing. Hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha perlu lebih ditingkatkan sehingga tercipta iklim yang harmonis guna menghasilkan produk barang jasa yang lebih kompetitif.

Lemahnya kualitas sumber daya manusia ditambah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, kurang terpeliharanya kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga rawan terjadi erosi, mengakibatkan pada keterbatasan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam sehingga mengganggu ketahanan pangan. Tantangan ke depan permasalahan-permasalahan di atas perlu segera diantisipasi, dikendalikan dan dikurangi secara bertahap serta terus diupayakan peningkatan produktivitas pertanian.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian, antara lain pasar-pasar tradisional, pasar-pasar desa yang selanjutnya berdampak pada keterbatasan dan kelemahan untuk memasarkan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan negara. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia akan memperlemah daya saing sehingga kedepan dituntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek. Upaya jejaring kerja sama 3 (tiga) pilar perlu lebih ditingkatkan lagi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha untuk melakukan penelitian, kajian, serta penerapan teknologi sehingga semakin meningkatkan daya saing. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kreativitas dan inovasi masyarakat di bidang iptek perlu ditingkatkan, serta pengalokasian dana yang memadai guna kepentingan penelitian yang implementatif bagi solusi permasalahan di daerah perlu diperhatikan.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

Meningkatnya jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pokok yaitu ketersediaan air baik untuk irigasi maupun air minum. Tantangan ke depan perlu diupayakan lagi pembangunan sarana prasarana penyediaan sumber daya air meliputi embung, waduk serta pemeliharaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat serta terwujudnya kelembagaan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi tantangan yang ke depan perlu diperhatikan mengingat perkembangan dan dinamika serta perkembangan perekonomian masyarakat wilayah pedesaan menuntut mobilitas yang tinggi. Selain itu ketersediaan sarana transportasi yang efektif dan efisien yang dapat menjangkau wilayah pedesaan guna mendukung mobilitas penduduk yang sebagian besar mengandalkan pada hasil pertanian guna memasarkan produknya.

Pemenuhan energi listrik sebagai kebutuhan pokok penduduk kedepan perlu segera diatasi mengingat belum seluruh masyarakat menikmatinya. Program konversi dari minyak tanah ke gas juga belum sepenuhnya dinikmati masyarakat utamanya masyarakat pedesaan yang

dengan segala keterbatasan masih menggunakan kayu bakar. Demikian juga pemakaian energi alternatif seperti biogas perlu dipikirkan penggunaannya mengingat melimpahnya ketersediaan bahan baku. Pemerataan akses sarana komunikasi bagi masyarakat juga perlu menjadikan perhatian mengingat belum keseluruhan mampu menjangkau wilayah terpencil.

Ketersediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik itu di kawasan pedesaan maupun perkotaan, termasuk didalamnya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sehingga terwujud lingkungan yang bersih dan nyaman sebagaimana komitmen *Millenium Development Goals (MDGs)* yang menuntut untuk secara bertahap bisa terpenuhi pada 20 tahun kedepan.

2.2.5 Politik dan Tata Pemerintahan.

Di bidang politik tantangan kedepan yang perlu diperhatikan adalah selalu menjaga momentum kondusivitas iklim sejuk yang sudah tercipta. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat selama Pilpres, Pemilu Legislatif, Pilgub, maupun Pilbup dan implementasi kebijakan desentralisasi yang menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat perlu dijaga kesinambungannya. Selain itu upaya peningkatan pelayanan publik yang prima, dengan berbasas pada norma-norma tata pemerintahan yang baik perlu terus ditingkatkan.

Seiring dengan era keterbukaan yang terus bergulir dituntut adanya transparansi disemua lini utamanya aparat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perlunya standar operasional yang jelas dan transparan baik proses, prosedur, waktu, persyaratan, termasuk di dalamnya biaya yang dibutuhkan sehingga masyarakat akan puas dan terayomi.

2.2.6. Keamanan dan Ketertiban.

Perubahan geopolitik nasional akan mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam

bidang keamanan dan ketertiban adalah selalu menjaga komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kondusivitas wilayah sehingga upaya pemerintah daerah dalam melayani masyarakat berjalan dalam suasana sejuk, aman dan tertib.

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban perlu ditingkatkan melalui pembinaan aparat terkait, sehingga terwujud kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa bergantung pada pemerintah.

2.2.7 Hukum dan Aparatur.

Tantangan di bidang hukum ke depan adalah upaya penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, menjunjung tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Seiring dengan kemajuan zaman, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan serta pengawasan jalannya pemerintah perlu terus dibangun dan diakomodir guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu terus didorong agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang.

Kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Blera harus betul-betul diperhatikan, mengingat ruang semakin lama akan menjadi komoditi yang sangat strategis sekaligus rawan konflik. Untuk itu pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman dan produktif harus dipersiapkan secara matang.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk jelas akan meningkatkan kebutuhan akan lahan sehingga pelayanan administrasi pertanahan demi kepastian hukum serta memihak pada kepentingan rakyat harus terus diupayakan.

Selain itu kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan perlu secara bertahap dikurangi, baik itu kesenjangan kualitas lahan/hunian maupun tingkat kesejahteraan masyarakat, untuk itu pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan pemanfaatan keanekaragaman potensi dan keunggulan sumber daya alam serta kearifan lokal di setiap wilayah demi kesejahteraan dan menjaga stabilitas daerah.

2.2.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Blora harus betul-betul dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan upaya pelestarian serta kurangnya konservasi akan menurunkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Beberapa wilayah di Kabupaten Blora berpotensi mengalami bencana alam yang disebabkan adanya penjarahan hutan, penambangan liar, serta kekeringan. Kondisi kemiskinan sebagian masyarakat menyebabkan ketidakpedulian masyarakat akan arti penting lingkungan, sehingga bahan tambang galian golongan C yang tersedia melimpah menjadi salah satu alternatif mata pencaharian.

Demikian juga eksploitasi air bawah tanah yang mulai marak dilakukan demi meraih keuntungan tanpa memikirkan dampak negatifnya. Tantangan kedepan perlu dipikirkan adanya perangkat/aturan hukum yang jelas mengatur hak dan kewajiban serta sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

2.3 MODAL DASAR.

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Blora yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun modal dasar pembangunan daerah Kabupaten Blora meliputi :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Blora merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu kualitas sumberdaya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blora yang berdaya saing.
2. Kekayaan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan Kabupaten Blora sehingga sumber daya alam yang dimiliki harus dapat dipergunakan secara wajar dan bertanggungjawab serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat, seperti energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan.
3. Berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak kondisi pembangunan politik di Kabupaten Blora yang kondusif dan menjadi salah satu modal dasar pembangunan.

BAB III
VISI DAN MISI
KABUPATEN BLORA TAHUN 2005–2025

3.1 VISI KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 - 2025

Visi pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional, serta berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Blora dalam 20 tahun kedepan, maka Visi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 adalah :

***Terwujudnya masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil,
damai dan demokratis***

Masyarakat yang maju merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masyarakat maju adalah masyarakat yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan untuk merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Masyarakat maju bisa diukur dari berbagai indikator seperti misalnya ; tingkat kemampuan sumber daya manusia yang tinggi, tingkat kemampuan ekonomi yang memadahi, tingkat partisipasi publik dan juga tingkat kemandirian daerah.

Masyarakat sejahtera juga merupakan suatu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar materiil dan spirituilnya. Masyarakat sejahtera suatu daerah dapat diukur oleh berbagai indikator. Beberapa indikator pokok yang seringkali digunakan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan daya beli, tingkat kemiskinan.

Masyarakat yang adil ditandai oleh berbagai aspek seperti misalnya ; kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan taraf hidup, mendapatkan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang adil juga ditandai dengan kesempatan yang

sama untuk menggunakan hak politiknya serta perlindungan dan kesamaan didalam hukum. Masyarakat yang adil berarti pula tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah.

Masyarakat yang damai merupakan salah satu hal penting yang diharapkan di Kabupaten Blora. Masyarakat damai ditandai paling tidak dengan beberapa indikator seperti misalnya ; tingkat keamanan, tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang damai paling tidak dengan penghormatan yang tinggi terhadap pluralisme dan berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat demokratis merupakan salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan bersama. Masyarakat demokratis ditandai dengan penghormatan terhadap hak – hak dan kewajiban – kewajiban politik yang hidup di kalangan masyarakat, penghormatan terhadap berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat serta kemampuan sistem sosial politik dalam memelihara keseimbangan sosial dalam sebuah tatanan yang mapan.

3.2 MISI KABUPATEN BLORA TAHUN 2005–2025

Untuk mencapai Visi Pembangunan tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemanfaatan iptek melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, beriman dan bertakwa. Misi mewujudkan Sumber Daya Alam yang berkualitas adalah dalam rangka untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang sejahtera.

2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.

Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat adalah upaya –

upaya untuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar, kemampuan daya beli masyarakat dan sebagainya. Meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat merupakan potensi untuk mewujudkan daya saing daerah, dengan memperkuat basis ekonomi daerah yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadahi, dan mempersiapkan berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah secara optimal. Misi mewujudkan daya saing daerah adalah dalam upaya untuk mencapai Kabupaten Blora yang maju, mengingat suatu daerah tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki daya saing.

3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana adalah memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi kebutuhan infrastruktur antara lain sarana dan prasarana transportasi, kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan fasilitas sosial.

Keberadaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menunjang pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, adalah suatu upaya untuk mendistribusikan pembangunan dan hasil – hasilnya secara merata sehingga kesenjangan antar wilayah dalam kabupaten dapat diminimalisir. Dalam rangka memenuhi azas pemerataan perlu diperhatikan pemerataan pembangunan baik tingkat pedesaan maupun perkotaan dengan mengacu pada peraturan penataan ruang, sehingga tidak terdapat kesenjangan pembangunan

antar wilayah. Pembangunan yang berazaskan keadilan harus meniadakan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Misi mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Blora yang adil;

5. **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis**, adalah suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi – fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang baik dan kondusif. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik penting agar memungkinkan diimplementasikannya prinsip – prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi, komunikasi, tidak adanya korupsi, serta penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Misi mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis adalah upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang demokratis.
6. **Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman**, adalah suatu upaya membentuk iklim yang sejuk dan kondusif yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Stabilitas sosial, politik menjadi salah satu bagian penting yang harus diwujudkan agar ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terwujud demi suksesnya pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Misi mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman adalah dalam upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang damai.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 – 2025

4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang Maju, Sejahtera, Adil, Damai dan Demokratis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan, diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

4.1.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), dan menurunnya balita kurang gizi dan gizi buruk.
- b. Meningkatnya pemerataan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Meningkatnya kualitas SDM dengan tolok ukur peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya APK, APM dan Angka Melek Huruf.
- d. Meningkatnya pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
- e. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- f. Meningkatnya sistem pelayanan kependudukan, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi untuk pengendalian pertumbuhan dan penyebaran penduduk.
- g. Meningkatnya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat berbudaya, yang mendasarkan pada arifan lokal.

4.1.2. Terwujudnya Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat, yang ditandai hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, laju inflasi dapat dipertahankan pada kisaran dibawah 10%, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi kurang dari 15% dengan meningkatnya pendapatan per-kapita di Kabupaten Blora.
- b. Meningkatnya struktur perekonomian ke arah sektor sekunder dan tersier.
- c. Meningkatnya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan finansial sehingga ketergantungan ekonomi terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.
- d. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau.
- e. Meningkatnya produktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja.

4.1.3. Terwujudnya pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan yang handal untuk menjamin kelancaran lalu lintas perekonomian
- b. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan energi dan tenaga listrik di seluruh wilayah kabupaten blora
- c. Meningkatnya upaya pemeliharaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Meningkatnya ketersediaan prasarana telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten blora
- e. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan perumahan/ pemukiman beserta fasilitasnya yang sehat dan murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

4.1.4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yang ditandai dengan :

- a. Tercapainya percepatan pembangunan sarana dan prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatnya peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayahnya sebagai wujud kepedulian memajukan wilayah terutama pada daerah-daerah tertinggal
- c. Tercapainya pemerataan pembangunan di semua bidang, semua wilayah dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat bertumpu pada kesetaraan gender dan tanpa diskriminasi.

4.1.5. Terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ditunjukkan oleh :

- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- b. Terwujudnya sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.

4.1.6. Terwujudnya kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman, yang ditunjukkan dengan :

- a. Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman dan tenteram dengan adanya jaminan rasa aman dan bebas dari keresahan akibat dari tindak kejahatan dalam segala bentuk yang bisa muncul setiap saat di tengah masyarakat
- b. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparat perlindungan masyarakat (Linmas) bersama komponen sosial yang ada dalam rangka mengantisipasi berbagai penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman.
- c. Terbangunnya suasana saling memahami dan kerjasama yang konstruktif di antara berbagai komponen sosial di tengah masyarakat dengan lembaga pemerintah kabupaten guna

mewujudkan kehidupan sosial politik yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

- d. Terwujudnya pendidikan sosial politik yang memadai dalam rangka membangun kedewasaan, partisipasi masyarakat, sehingga tercipta suasana kondusif guna mendukung pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

4.2. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai terwujudnya masyarakat Blora yang Maju, Sejahtera, Adil, Damai dan Demokratis, arah pembangunan daerah selama dua puluh tahun kedepan adalah :

4.2.1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunnya balita kurang gizi dan gizi buruk.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, penanganan masalah gizi, pemenuhan ketersediaan obat dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat serta peningkatan sarana prasarana kesehatan.
- d. Peningkatan akses, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau masyarakat miskin.
- e. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan profesionalisme kemampuan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, pengembangan pendidikan non formal dan penyediaan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan

terjangkau.

- f. Meningkatkan pengembangan sistem kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera.
- g. Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, informatif dan bermutu, aman dan efektif dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, beriman dan bertakwa diarahkan pada terpeliharanya budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, pelayanan dan kemudahan dalam melaksanakan ajaran agama, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama.

4.2.2. Mewujudkan kualitas ekonomi masyarakat

- a. Perekonomian daerah dikembangkan dengan orientasi utama untuk memperkuat ekonomi daerah dengan tetap bertumpu pada penguatan daya saing ekonomi. Perlu dilakukan pergeseran paradigma basis daya saing ekonomi daerah dari keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Untuk itu pembangunan perlu diarahkan pada upaya-upaya pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara profesional dan berkelanjutan dengan dibarengi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Struktur ekonomi diperkokoh dengan menempatkan sektor industri khususnya industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas (termasuk hasil hutan) sebagai sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, pertanian dalam arti luas dan perdagangan serta sektor energi dan sumber daya mineral (khususnya pertambangan minyak dan gas bumi rakyat) perlu dikelola secara lebih profesional dan optimal. UKM dan Koperasi diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang memainkan peran yang signifikan dalam percaturan ekonomi daerah baik dalam hal

kontribusinya terhadap PDRB maupun penyerapan tenaga kerja serta menghasilkan produk yang mampu bersaing. Untuk itu perlu dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kewirausahaan UKM dan koperasi sehingga UKM dan koperasi betul – betul dapat memperkuat struktur ekonomi daerah dan memiliki daya saing.

- c. Peningkatan investasi daerah secara signifikan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan upaya – upaya untuk menarik investor dengan cara menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif, promosi yang lebih gencar, Pemerintah Kabupaten Blora perlu menyediakan dan meningkatkan infrastruktur serta pendukung investasi daerah, regulasi dan perijinan yang efisien, tidak diskriminatif, efektif serta menjaga dan mengembangkan iklim persaingan usaha secara sehat.
- d. Kebijakan sektor ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya di sektor formal maupun informal. Untuk itu pengembangan perekonomian daerah diarahkan pada sektor yang padat tenaga kerja dalam upaya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
- e. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan dan swasembada pangan. Upaya itu perlu didukung dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan IPTEK serta dengan pengembangan industri hilir sektor pertanian (industri pengolahan hasil pertanian).

4.2.3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

- a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi penghubung antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan wilayah

- b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara diarahkan pada terwujudnya Bandara Ngloram untuk melayani penerbangan domestik dalam rangka pengembangan wilayah Blok Cepu.
- c. Pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menjamin ketersediaan sumber daya air secara lestari yang diwujudkan melalui pembangunan waduk, embung, sumur resapan untuk memenuhi berbagai kepentingan.
- d. Pembangunan penyediaan air bersih diarahkan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor terkait lainnya.
- e. Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi diarahkan pada terpenuhinya prasarana telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana dan prasarana telekomunikasi sehingga dapat mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- f. Pengembangan sumber daya energi dan kelistrikan diarahkan untuk pemenuhan penyediaan jaringan energi listrik dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Blora
- g. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada penyediaan perumahan dan lahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun perdesaan.
- h. Pembangunan prasarana lingkungan perumahan/permukiman diarahkan penanganan persampahan, drainase dan sanitasi yang sehat dan berwawasan lingkungan.
- i. Pembangunan fasilitas sosial perumahan/permukiman diarahkan pada pembangunan tempat ibadah, prasarana pendidikan, tempat olahraga dan penyediaan ruang terbuka hijau.

4.2.4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan

- a. Melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan membuka isolasi wilayah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

- b. Pengembangan wilayah dilakukan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- c. Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan pembangunan di setiap sektor maupun wilayah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan
- d. Melakukan peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayahnya sebagai wujud kepedulian untuk memajukan secara utuh wilayahnya terutama pada daerah-daerah tertinggal. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan insentif baik material maupun immaterial atas hasil karya dan kerja sebagai bentuk simbolis kemanunggalan pemerintah dan warga.
- e. Pemerataan pembangunan pada semua sektor dan seluruh wilayah hingga pelosok terpencil. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender maupun strata masyarakat.

4.2.5. Terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

- a. Peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Blora, baik pendidikan formal, pendidikan informal maupun Diklat Teknis dan non Teknis. Dengan peningkatan pendidikan ini diharapkan ke depan akan tersedia aparatur yang benar-benar berkualitas.
- b. Peningkatan sarana prasarana aparatur serta peningkatan pelayanan melalui program *e-government*, diharapkan kedepan pelayanan melalui program *e-government* sudah berjalan lancar, termasuk peningkatan tertib administrasi kependudukan, yakni terwujudnya Nomor Induk Kependudukan dan terbangunnya *data base* kependudukan dan catatan sipil yang terpusat dalam bank data di Kabupaten Blora sesuai standar nasional untuk meminimalisir KTP dan KK ganda, sehingga setiap penduduk hanya dapat memiliki satu identitas penduduk yang dipergunakan dalam berbagai kepentingan pelayanan publik.

- c. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah Daerah. Dengan optimalisasi kapasitas aparatur dan kelembagaan diharapkan akan tercipta aparatur dan kelembagaan yang mumpuni.
- d. Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah berdasarkan pada prinsip disiplin, akuntabel, efektif dan efisien sehingga pelayanan prima dapat berjalan dengan lancar.
- e. Peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat sehingga tercipta hukum yang adil, demokratis dan transparan.
- f. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum berdasar pada asas bersih, jujur dan adil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar serta berdaya saing sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

4.2.6. Terwujudnya kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman

- a. Peningkatan kerjasama yang lebih intensif antar berbagai komponen sosial dengan jajaran aparat keamanan serta perlindungan masyarakat (Linmas) melalui kegiatan bersama dalam bentuk forum pertemuan periodik yang teratur, pelatihan maupun kegiatan bersama dalam rangka penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b. Peningkatan intensitas dan kualitas pelatihan dan pendidikan yang ideal bagi jajaran perlindungan masyarakat (Linmas) bekerja sama dengan pihak terkait sehingga mereka lebih memiliki kemampuan dan ketrampilan terkait dengan penegakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
- c. Pengembangan jumlah aparat Linmas secara bertahap untuk menyesuaikan cakupan luas wilayah dan jangkauan jenis permasalahan sosial yang semakin kompleks di tengah masyarakat

- dalam rangka mempercepat penanganan berbagai tindakan yang bisa mengganggu ketertiban dan ketenteraman anggota masyarakat
- d. Peningkatan kerja sama yang lebih intensif antara partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ormas keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Blora untuk menciptakan suasana persaudaraan serta persatuan sebagai warga Kabupaten Blora. Peningkatan kerja sama melalui kegiatan bersama, forum silaturahmi, penyuluhan sosial, pertemuan rutin periodik guna menciptakan suasana demokratis dan terbuka.
 - e. Peningkatan kerja sama antara aparat pemerintah maupun aparat keamanan dengan tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga sosial yang ada di tingkat akar rumput untuk menghidupkan kembali semangat dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram dan damai. Peningkatan hubungan difasilitasi lembaga pemerintah beserta jajaran penegak hukum dan tokoh masyarakat sehingga terdapat rasa saling percaya di antara komponen sosial yang ada di Kabupaten Blora
 - f. Pengembangan budaya politik diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran sosial akan pentingnya toleransi, keterbukaan, keharmonisan serta suasana damai di seluruh wilayah Kabupaten Blora agar pembangunan bisa berjalan aman, lancar dan berkesinambungan dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat yang ada
 - g. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi peran pemerintah dalam wujud sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan bidang sosial politik dalam rangka meningkatkan fungsi partai politik dan asosiasi sosial lainnya sebagai lembaga penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat
 - h. Penyempurnaan struktur politik yang mampu memantapkan pelembagaan demokrasi yang kuat, memperkuat hubungan pemerintah Kabupaten Blora dengan berbagai lembaga politik, meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam menjalankan

fungsi pelayanan publik serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai undang-undang yang berlaku dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

- i. Peningkatan kehidupan sosial masyarakat yang menitikberatkan pada kesadaran sosial, wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan suasana aman, tertib dan tenteram demi tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera di seluruh wilayah Kabupaten Blora
- j. Memperkuat konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan sosial politik yang bisa ditunjukkan dengan indikator meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, pelayanan birokrasi pemerintah yang profesional, netral dan tidak diskriminatif, masyarakat yang mandiri dan bebas menyampaikan aspirasi serta kehidupan masyarakat yang harmonis, terbuka dan toleran.

4.3. TAHAPAN

Dalam rangka mewujudkan substansi visi, misi, sasaran pokok dan arahan pembangunan jangka panjang perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan prioritas permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas pada setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

4.3.1. RPJMD I (2006 – 2010)

Pada RPJMD Pertama, pembangunan di Kabupaten Blora berorientasi pada kelanjutan pencapaian target pembangunan dalam periode sebelumnya, dengan mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.1.1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

- a. Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui ketersediaan tenaga medis, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan peralatan yang memadai serta pemenuhan obat-obatan yang menjangkau masyarakat miskin.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 71,5 tahun, menurunnya angka Kematian Bayi menjadi 3,5 per 1000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 80 per 1000 kelahiran hidup, menurunnya Balita kurang gizi dan gizi buruk.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan
- e. Pembangunan dan pembinaan perpustakaan sebagai sumber informasi
- f. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan mendorong peningkatan kelulusan pada jenjang pendidikan menengah.
- g. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.
- h. Peningkatan jumlah peserta KB untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- i. Peningkatan kepedulian pada etika, moral keagamaan, dan budaya lokal untuk memperkuat identitas daerah
- j. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.3.1.2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat

- a. Peningkatan peran UMKM melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan semangat kewirausahaan dalam mendorong daya saing UMKM.
- b. Pengembangan produksi dan mutu hasil pertanian (dalam arti luas) yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
- c. Penciptaan peluang investasi daerah melalui penyiapan perangkat

- lunak (regulasi dan kebijakan perijinan), kelembagaan dan peningkatan infrastruktur pendukung.
- d. Peningkatan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
 - e. Pengembangan industri hilir (industri pengolahan hasil pertanian) dan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)
 - f. Peningkatan kualitas ekonomi yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi pada kisaran dibawah 10% menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi dibawah 25% penurunan jumlah pengangguran terbuka dan kenaikan pendapatan perkapita setiap tahun.
 - g. Peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

4.3.1.3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

- a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat melalui pembangunan jalan dan jembatan kabupaten, pembangunan jalan poros desa dan jalan yang menghubungkan dengan wilayah perbatasan.
- b. Pembangunan Bandara Ngloram sebagai bandara perintis dan pembangunan fasilitas bandara.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung aktivitas produksi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Pembangunan jaringan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dengan peningkatan luas layanan dan kemudahan akses
- f. Pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih dan sanitasi
- g. Pembangunan perumahan dan prasarana dasar pengelolaan persampahan dan drainase

- h. Pembangunan fasilitas sosial perumahan sebagai sarana aktivitas masyarakat.

4.3.1.4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

- a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dengan memperhatikan potensi dan keunggulan daerah
- b. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah
- c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan kebijakan pembangunan.
- d. Pengembangan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dan remaja

4.3.1.5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur melalui penataan kelembagaan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- b. Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang professional, bersih dan bertanggung jawab.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur dan demokratis melalui profesionalisme aparat dan penegak hukum yang didukung oleh partisipasi masyarakat.
- d. Pengembangan masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi melalui melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sehingga terbentuk perilaku masyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.

4.3.1.6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman

- a. Pengembangan kerjasama antar berbagai komponen sosial dengan jajaran aparat keamanan dalam rangka penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

- b. Pendidikan dan pelatihan bagi jajaran aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam penegakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
- c. Pengembangan kuantitas dan kualitas aparat keamanan dalam rangka mempercepat penanganan berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
- d. Pengembangan kerjasama antara partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana persaudaraan dan persatuan
- e. Peningkatan peran aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan lembaga sosial guna mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram dan damai.

4.3.2. RPJMD II (2011 – 2015)

Pada RPJMD Kedua, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama, pembangunan Kabupaten Blora tahap selanjutnya diarahkan untuk lebih memantapkan kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.2.1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

- a. Peningkatan pemerataan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga medis dan penataan kelembagaan (pembentukan BLUD Rumah Sakit) serta mewujudkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, menurunnya angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, menurunnya prosentase balita kurang gizi menjadi 5,4% menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup, meningkatnya kelahiran yang ditolong Tenaga Medis dan menurunnya prosentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- c. Pengembangan potensi masyarakat dalam mendukung upaya

- perbaikan dan kecukupan gizi.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional kependidikan.
 - e. Pengembangan budaya baca, peningkatan pembinaan perpustakaan agar mampu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan daerah.
 - f. Peningkatan program jenjang pendidikan menengah dan non formal untuk meningkatkan APK, APM dan menurunkan angka buta aksara dan peningkatan pemerataan kesempatan belajar.
 - g. Peningkatan mutu program KB dan pemasyarakatan program transmigrasi mandiri.
 - h. Peningkatan kesadaran penerapan etika, moral keagamaan, dan budaya lokal untuk memperkuat identitas daerah.
 - i. Peningkatan kesadaran untuk mengamalkan ajaran agama dan pemeliharaan toleransi antar umat beragama.

4.3.2.2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat

- a. Penguatan peran UMKM dalam menumbuhkan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya dan pengembangan jaringan pemasaran.
- b. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dengan pemanfaatan IPTEK yang berorientasi bisnis pertanian dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan.
- c. Peningkatan peluang investasi daerah melalui promosi potensi investasi dan penciptaan iklim yang sehat bagi investasi.
- d. Peningkatan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas dan produktifitas SDM.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui peningkatan kualitas SDM dan didukung sarana prasarana yang memadai.
- f. Membaiknya kualitas ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi diatas 5% per tahun, laju inflasi pada kisaran dibawah 10% menurunnya jumlah penduduk miskin, penurunan jumlah pengangguran terbuka dan pendapatan perkapita penduduk

mengalami peningkatan setiap tahun.

- g. Pengurangan beban biaya penduduk miskin dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan social ekonomi.

4.3.2.3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

- a. Pembangunan terminal Blora dan Cepu yang melayani angkutan jarak jauh, sedang dan dekat dan peningkatan peremajaan moda angkutan darat.
- b. Peningkatan kelas bandara Ngloram dalam rangka mendukung pengembangan Blok Cepu
- c. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung daya saing perekonomian serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
- d. Peningkatan pelayanan jaringan listrik pada daerah terisolir dan pengembangan energi alternatif.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dengan pengelolaan yang handal
- f. Peningkatan jaringan air bersih dan sanitasi dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat
- g. Peningkatan ketersediaan perumahan dan prasarana dasar permukiman yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
- h. Peningkatan pemeliharaan fasilitas sosial sebagai sarana masyarakat.

4.3.2.4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

- a. Pengembangan investasi untuk percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja.
- b. Peningkatan konsistensi pelaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- c. Percepatan pembangunan pada wilayah pelosok dan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan wilayah

- d. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dan remaja

4.3.2.5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

- a. Peningkatan kapasitas aparatur melalui motivasi yang kuat dan tanggung jawab terhadap tugasnya dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- b. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan pendidikan (formal), non formal, diklat teknis dan non teknis dalam menunjang kelancaran pelayanan publik.
- c. Peningkatan system penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, demokratis dan berkesadaran hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, aparatur dan penegak hukum.
- d. Pengembangan kualitas aparatur penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan hukum dan HAM yang didukung oleh peningkatan kualitas lembaga penegak hukum.

4.3.2.6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman

- a. Peningkatan kerjasama antara partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana persaudaraan dan persatuan.
- b. Peningkatan peran aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan lembaga sosial dengan dasar rasa saling percaya di antara komponen sosial yang ada.
- c. Pengembangan budaya politik dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya toleransi, keterbukaan, keharmonisan serta suasana damai di seluruh wilayah Kabupaten Blora.

4.3.3. RPJMD III (2016 – 2020)

Pada RPJMD Ketiga, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama dan RPJMD Kedua, pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu teknologi yang terus meningkat yang mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.3.1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

- a. Peningkatan pemerataan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan tenaga medis yang professional yang mendorong terwujudnya Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- b. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 72,9 tahun, menurunnya angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup menjadi 0 (nol), menurunnya prosentase balita kurang gizi menjadi 0% menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 20 per 1000 kelahiran hidup, meningkatnya kelahiran yang ditolong Tenaga Medis dan menurunnya prosentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- c. Peningkatan pembangunan dan perbaikan gizi melalui sinergitas sektor-sektor terkait yang dalam rangka mendorong tercapainya status gizi masyarakat yang baik.
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dengan dukungan tenaga pendidik yang profesional berbasis kompetensi, kurikulum yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan berbasis teknologi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- f. Penguatan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat pada program transmigrasi mandiri
- g. Penguatan kearifan budaya lokal daerah dengan pembentukan karakter masyarakat yang beretika dan bermoral.
- h. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan penguatan toleransi antar umat beragama.

4.3.3.2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat

- a. Peningkatan kualitas dan inovasi produk dalam mendorong daya saing UMKM.

- b. Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian (dalam arti luas) dengan orientasi bisnis pertanian dalam rangka menjamin ketahanan pangan dan mendorong daya saing produk.
- c. Peningkatan investasi daerah yang mampu membuka peluang kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
- d. Penguatan sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui peningkatan produk dengan sentuhan IPTEK yang mampu mengakses pasar local regional.
- e. Pengembangan nilai tambah sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang berbasis IPTEK.
- f. Peningkatan kualitas ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi diatas 5% per tahun, laju inflasi pada kisaran dibawah 10% menurunnya jumlah penduduk miskin, penurunan jumlah pengangguran terbuka dan pendapatan perkapita penduduk mengalami kenaikan di setiap tahun.
- g. Peningkatan kualitas SDM dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan ketrampilan berusaha, permodalan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin pada berbagai kegiatan sosial ekonomi.

4.3.3.3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

- a. Pembangunan terminal di Kunduran, Randublatung, Ngawen, Todanan, Bogorejo untuk melayani angkutan jarak dekat
- b. peningkatan akses ke bandara untuk memperlancar lalu lintas bandara
- c. peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjamin terpeliharanya sarana dan prasarana sumber daya air.
- d. Penguatan pelayanan jaringan listrik di seluruh wilayah dan pemanfaatan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

- e. penguatan pengelolaan telekomunikasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan telekomunikasi yang mendukung peningkatan ekonomi.
- f. Penguatan kelembagaan pengelolaan air bersih dan penguatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
- g. Peningkatan penyediaan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.

4.3.3.4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan

- a. Penguatan produk unggulan daerah dan memperlancar distribusi
- b. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan
- c. Penguatan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan peningkatan investasi dan akses pasar
- d. Penguatan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dan remaja

4.3.3.5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan birokrasi yang didukung oleh kualitas sarana prasarana berbasis teknologi.
- c. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, demokratis dan berkesadaran hukum yang berdasar keadilan dan kebenaran bagi masyarakat.
- d. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yang mampu menegakkan hukum secara adil, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM.

4.3.3.6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman

- a. Penguatan budaya politik dalam rangka mendukung pembangunan agar berjalan aman, lancar dan berkesinambungan dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan
- b. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan bidang sosial politik untuk meningkatkan peran partai politik dan asosiasi lainnya sebagai lembaga penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat
- c. Penguatan struktur politik yang mampu memantapkan pelembagaan demokrasi yang kuat, memperkuat hubungan pemerintah dengan berbagai lembaga politik

4.3.4. RPJMD IV (2021 – 2025)

Pada RPJMD Keempat, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama, RPJMD Kedua dan RPJM Ketiga, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing yang mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.4.1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

- a. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan tenaga medis yang professional dan penerapan SPM kesehatan serta mewujudkan Jaminan Pemeliharaan Masyarakat.
- b. Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dari semakin membaik dan mantapnya indikator-indikator kesehatan masyarakat.
- c. Pemantapan peningkatan status gizi masyarakat yang baik yang tercermin dari nilai kandungan gizi yang cukup, seimbang dan terjamin keamanannya.
- d. Pemantapan mutu pelayanan pendidikan dengan dukungan tenaga

pendidik yang handal, kurikulum yang sesuai perkembangan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan meratanya kesempatan pendidikan

- e. Pemantapan mutu pelayanan perpustakaan berbasis teknologi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- f. Pemantapan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta sistem kependudukan yang handal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- g. Pemantapan pembentukan karakter masyarakat dan terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal
- h. Pemantapan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan terpeliharanya toleransi antar umat beragama.

4.3.4.2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat

- a. Pemantapan daya saing UMKM melalui akses pemasaran yang berbasis teknologi informasi.
- b. Pemantapan daya saing produk pertanian yang berorientasi bisnis pertanian yang mampu menjamin ketahanan pangan.
- c. Penguatan investasi daerah yang mampu membuka peluang kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin.
- d. Penguatan produk-produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
- e. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong penguatan ekonomi masyarakat.
- f. Kualitas ekonomi semakin maju yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi diatas 5,5% per tahun, menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi dibawah 10%, penurunan jumlah pengangguran terbuka menjadi dibawah 2.5%, dan pendapatan perkapita penduduk mengalami kenaikan.
- g. Terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin.

4.3.4.3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

- a. Terpeliharanya kualitas jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabuapten Blora dengan kualitas yang baik dan terpeliharanya fasilitas terminal angkutan untuk memperlancar perekonomian daerah.
- b. Pemantapan pemeliharaan bandara Ngloram beserta seluruh fasilitasnya untuk meningkatkan roda perekonomian daerah dan regional
- c. Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang handal dan kuatnya kelembagaan pengelola sumber daya air
- d. Pemantapan pelayanan jaringan listrik di seluruh pelosok dan terpeliharanya pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan energi.
- e. Pemantapan sistem telekomunikasi dengan memperhatikan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan komunikasi.
- f. Pemantapan pemanfaatan air bersih permukaan dan air tanah dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan sumber daya air.
- g. Pemantapan kualitas perumahan dan permukiman yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah dan lingkungan hidup.

4.3.4.4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

- a. pemantapan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan melalui perluasan dan diversifikasi kegiatan ekonomi dan perdagangan
- b. Pemantapan perekonomian daerah dengan pembangunan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan pengentasan kemiskinan
- c. Pemantapan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dengan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dan remaja

4.3.4.5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

- a. Pemantapan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- b. Pemantapan kualitas pelayanan publik (pelayanan prima) yang cepat, transparan dan akuntabel yang didukung oleh aparatur yang professional, bersih dan bertanggungjawab.
- c. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, demokratis dan berkesadaran hukum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
- d. Peningkatan penegakan hukum secara adil, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

4.3.4.6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman

- a. Pemantapan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta memperkuat otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat
- b. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk mewujudkan rasa aman, tertib dan tenteram
- c. Pemantapan konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan sosial politik.

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bora Tahun 2005 – 2025 yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bora merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Bora dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan.

RPJP Kabupaten Bora merupakan pedoman bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan dokumen perencanaan lainnya.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bora dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis perlu didukung oleh beberapa hal, yaitu : 1) Komitmen dari Pimpinan Daerah yang kuat dan demokratis, 2) Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah, 3)Keberpihakan pada masyarakat, 4) Komitmen untuk pelayanan publik, serta 5) Komitmen dan partisipasi masyarakat.

BUPATI BLORA,

Cap. ttd.

DJOKO NUGROHO